



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Otok Kuswandaru

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bima Haria Wibisana

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Desember 2022

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara


Bima Haria Wibisana
NIP. 196107191989031001

Pihak Pertama

Deputi Bidang Pengawasan dan
Pengendalian


Otok Kuswandaru
NIP. 196906191995031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
SS.1	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU.1	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal A dan B)	60
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SS.2	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	IKU.2	Indeks kepuasan masyarakat	89
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SS.3	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	IKU.3	Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN	100
		IKU.4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti	95
		IKU.5	Persentase pertimbangan teknis pengangkatan/pemindahan/pemberhentian/promosi/mutasi kepegawaian instansi pemerintah yang mengalami kekosongan PPK yang diselesaikan tepat waktu	100
		IKU.6	Jumlah rekomendasi kebijakan atas hasil pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN	1
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
SS.4	Terwujudnya ASN Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang kompeten	IKU.7	Indeks profesionalitas ASN di lingkup Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian	80
SS.5	Terwujudnya sistem informasi internal di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian	IKU.8	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar	100
SS.6	Terwujudnya birokrasi Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	IKU.9	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	35
SS.7	Terkelolanya anggaran Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian secara efisien dan akuntabel	IKU.10	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	79
		IKU.11	Persentase realisasi anggaran	100
		IKU.12	Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100

Kode/ KRO	Kegiatan	Pagu Alokasi	
088.01.CO	PROGRAM KEBIJAKAN, PEMBINAAN PROFESI, DAN TATA KELOLA ASN	Rp	4.425.000.000
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	Rp	4.425.000.000
TOTAL PAGU ALOKASI		Rp	4.425.000.000

Jakarta, 19 Desember 2022

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Bima Haria Wibisana
NIP.196107191989031001

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan dan
Pengendalian



Otok Kuswandaru
NIP.196906191995031001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
REFORM/INOVASI
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Sasaran Strategis		IKU		Reform/Inovasi
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
SS 1	Terwujudnya instansi pemerintah yang professional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU 1	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan aplikasi indeks NSPK versi 2.0) 2. Penyederhanaan indikator penilaian indeks NSPK 3. Penyempurnaan POS AP penilaian indeks NSPK
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SS 2	Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang berkualitas	IKU 2	Indeks kepuasan masyarakat	Penyempurnaan instrumen survei dan penambahan frekuensi survei
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SS 3	Terwujudnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN	IKU 3	Persentase Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan aplikasi DeWasdal dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan permasalahan kepegawaian dengan melibatkan kantor regional 2. Penerapan reward dan punishment berbasis aplikasi DeWasdal
		IKU 4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan database tindaklanjut hasil wasdal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 2. Penerapan tindakan administratif dalam rangka mendorong tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian
		IKU 5	Persentase pertimbangan teknis pengangkatan/ pemindahan/ pemberhentian/ promosi/ mutasi kepegawaian instansi pemerintah yang mengalami kekosongan PPK yang diselesaikan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan seluruh unit terkait, proses cepat/tepat waktu dengan hasil akurat 2. Penyusunan POS AP pemberian pertimbangan teknis pengangkatan/ pemindahan/ pemberhentian/ promosi/ mutasi kepegawaian instansi pemerintah yang mengalami kekosongan PPK yang diselesaikan tepat waktu

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Bima Hania Wibisana
NIP. 196107191989031001

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian



Otok Kuswandaru
NIP.196906191995031001